



# **RANKIR RENJA 2025**



**DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA**





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah dan segala kemudahan-Nya bagi kita semua sehingga Dokumen RENJA REVIU SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan

Besar harapan kami bahwa Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dapat lebih bermanfaat dan dijadikan pedoman dalam menyusun dokumen rencana kerja pembangunan satu tahunan agar tujuan dari Visi dan Misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dapat terwujud.

Tentu didalam penyusunan Renja REVIU SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 kami menyadari masih terdapat banyak kealfaan, kelemahan dan kekurangannya, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan dokumen ini. Demikian pula untuk semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya dan setulus tulusnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan sekali lagi semoga renstra ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang berkepentingan khususnya buat para pengambil kebijakan.

Praya, 31 Juli 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lombok Tengah

**Drs.H. Muhamad**  
NIP.196607061993031015

# Daftar Isi

BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II .....	5
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 5	
2.2 Analisa Kinerja-Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika .....	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	28
Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu : 41	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
BAB III .....	49
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	49
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.....	49
BAB IV .....	54
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH .....	54
BAB V .....	65
PENUTUP .....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan Renja 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKP. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan
3. Urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
4. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah daerah berhak menerapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26).
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

1. Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah sebagai dokumen resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2025.
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan pengelolaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika untuk tahun rencana secara komprehensif, integralistik dan strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lombok Tengah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Komunikasi dan Informatika , proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika , keterkaitan antara Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika .



Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2 Analisa Kinerja-Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

- a) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ;
- b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika ;

- c) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional.
- d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ; dan
- e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilaksanakan
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda ; dan
- 4) Lampiran table 2.3

Awal RKPD tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Propinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan) Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini , antara lain :

- a Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
- b Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
- c Sajian table 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah**

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun rencana.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- a Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan
- b Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (Lima) tahunan dan
- c Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah di pahami

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah . Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan
- b Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran
- c Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah
- d Memenuhi kriteria Spesific, measurable, archievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)
- e Perumusan sasaran perlu memperhatikan indicator kinerja sasaran yang akan menjadi indicator kinerja utama perangkat daerah

Langka-langka dalam perumusan tujuan dan sasaran renja perangkat daerah :

- 1 Merumuskan rancangan pernyataan tujuan berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan
- 2 Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sarana dari setiap tujuan
- 3 Merumuskan indicator tujuan dan sarana yang terukur

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah . Rumusan tujuan dan sasaran dapat dirumuskan kembali berdasarkan pada tujuan dan sasaran serta induikator kinerja sasaran renstra perangkat daerah pada

tahun rencana, dan memperhatikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Tujuan dan sasaran perangkat daerah pada tahun rencana ditampilkan pada table 3.2 berikut:

Tabel 3.2  
Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024  
Kabupaten Lombok Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5	6

### 3.3 Program dan Kegiatan

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain:

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan. Dan Sub Kegiatan.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Beberapa penjelasan yang perlu ditampilkan dalam perumusan Program dan kegiatan yaitu :

- a Faktor – factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.
- b Uraian Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan , antara lain meliputi:
- c Penjelasan Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKP, baik jenis program/Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
- d Tabel rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan table 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi- atan/Subkegiat- an	Indikator Kinerja Program/Kegi- atan/SubKegi- atan	Rencana Tahun 2024				Cata- tan Penti- ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pa gu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

**BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran adak sesuai dengan kebutuhan.
- b) Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c) Rencana tindak lanjut

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tahun yang lalu (2023) adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun) 2023	Perkiraan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	Realisasi Target Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Relaisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Relaisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	PROGRAM PENUNJANG	NILAI SAKIP OPD	B	B	B	B			B	

		<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
1		<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase IKU OPD yang tercapai	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	3
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	3
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	3
	3	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	3

		Dokumen Perubahan RKA SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	3
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	3
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	3

			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		<b>Administrasi Keuanagan Perangkat Daerah</b>									
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Bulan	14 Bulan	100%
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1

		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perjalanan Dinas	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	6 Dokumen	18 Dokumen	100 %
	2	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebutuhan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	100 %
	3	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	5 Unit Motor	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	100%

		Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit Motor								
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	Paket	Paket	Paket	100%	Paket	Paket	100%	
<b>4</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Meja Kerja, 5 Buah Meja Kerja, 5 Kursi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	2 Meja Kerja, 2 Lemari Arsip	Unit		
<b>II</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN</b>	<b>Persentase OPD yang menjalankan pelayanan public secara on line</b>									

		<b>KOMUNIKASI PUBLIK</b>									
		<b>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>								
	1	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Media	41 Layanan	0	0	0	0	100%		
	2	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	- Operator PPID Aparat Desa Terlatih -Operator OPD SP4N -LAPOR terlatih -Operator Perangkat Daerah SP4N-LAPOR	40 Orang  -45 Orang	44 OPD	44 OPD	44 OPD	100%	44 OPD	44 OPD	100%

	3	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-Media Luar Ruangan  -Media Dalam Ruangan	-67 Media Luar Ruangan( Baliho/ Spanduk)  -Media Dalam Ruangan ( Podcast)					-67 Media Luar Ruangan( Baliho/ Spanduk)  -Media Dalam Ruangan ( Podcast)	-67 Media Luar Ruangan( Baliho/ Spanduk)  -Media Dalam Ruangan ( Podcast)	-67 Media Luar Ruangan ( Baliho/ Spanduk )  -Media Dalam Ruangan ( Podcast)
III		<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase OPD yang menjalankan pelayanan public secara on line								
		Pengelolaan Nam Doamin yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah									



		<b>Daerah Kabupaten/ Kota</b>									
	1	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Dearah  -Bandwith Internet ( Mbps)	4 Dokumen  600 Mbps ( Dedicat ed)	320 Mbps ( Dedicated )	340 Mbps ( Dedicated)	340 Mbps ( Dedicated )	340 Mbps ( Dedicated )	340 Mbps ( Dedicated )		
		<b>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>									
	2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aolikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	6 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%

I V	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Terselenggaranya pelaksanaan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	-3 Dokumen -60 Data								
	<b>Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Meta Data Statistik Sektoral yang terpublikasi</b>	-3 Dokumen -60 Data								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisi dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-3 Dokumen -60 Data	-48 Buku -24 Buku -3 Desa	-48 Buku -24 Buku -3 Desa	-48 Buku -24 Buku -3 Desa	100%	58 Data	-58 Buku -24 Buku -12 Desa	100%	
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>-Persentase Informasi Daerah yang diamankan(%)</b>									

			-Jumlah pengamanan persandian (OPD )  -jumlah Pengelola sandi yang terlatih								
		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah</b>	-32 orang -12 Bulan	-32 orang -12 Bulan	-32 orang -12 Bulan	-32 orang -12 Bulan		-32 orang -12 Bulan	-32 orang -12 Bulan	100%
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola sandi yang terlatih ( orang )	-32 orang -12 Bulan	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	-100% -32 OPD - 2 orang	100%

**a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

*Program/kegiatan pada tahun anggaran 2024 yang realisasi anggarannya masih belum mencapai target adalah :*

1. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD
  - Pada Sub Kegiatan tersebut belum mencapai secara maksimal dikarenakan dalam pengajuan pencairan pada subkegiatan tersebut tidak disetujui dengan alasan terlambat
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
  - Pada Sub Kegiatan tersebut belum mencapai secara maksimal dikarenakan dalam pengajuan pencairan pada subkegiatan tersebut tidak disetujui dengan alasan terlambat
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Pada Sub Kegiatan tersebut belum mencapai secara maksimal dikarenakan dalam pengajuan pencairan pada subkegiatan tersebut tidak disetujui dengan alasan terlambat
4. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan
  - Pada Sub Kegiatan tersebut belum mencapai secara maksimal dikarenakan dalam pengajuan pencairan pada subkegiatan tersebut tidak disetujui dengan alasan terlambat
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Pada Sub Kegiatan tersebut belum mencapai secara maksimal dikarenakan sisa anggaran foto copy yang tidak dibelanjakan
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pada Sub Kegiatan tersebut belum mencapai secara maksimal dikarenakan sisa pembayaran belanja Accu
7. Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan
  - Pada Sub Kegiatan tersebut belum mencapai secara maksimal dikarenakan pengajuan pengamprahan

8. Penguatan Kapasirtas Sumber Daya Komunikasi Publik

- Pada Sub Kegiatan tersebut belum mencapai secara maksimal Sisa belanja sesuai kebutuhan
- Ada honorarium narasumber yang tidak direalisasikan 1 orang dari 2 orang narasumber

9. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik

- Pada Sub Kegiatan tersebut belum mencapai secara maksimal dikarenakan dikarenakan pengajuan pengamprahan

**b) Realisasi program/kegiatan yang *telah memenuhi target* kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

- Pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang telah dicapai rata-rata sebesar 90 – 100 %.
- Pada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- Pada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

**c) Realisasi program/kegiatan yang *telah melebihi target* kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada**

**d) Faktor- factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan, dikarenakan pembatasan pengajuan amprah oleh perbendaharaan dengan alasan akhir tahun ( desember )**

**e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**

**f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

1. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait agar program dan kegiatan bisa berjalan sinergi;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan;

## **2.2 Analisa Kinerja-Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan yang tertuang didalam renstra dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2.2

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

## Kabupaten Lombok Tengah

N O	Indikator	SPM/stan dar Nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Index SPBE</b>			3,00	3,19	3,30	3,50	3,00	3,19	3,30	3,50	1. Mengembang kan infrastruktur TIK, membangun infrastruktur jaringan intra pemerintah yang menghubung

											kan semua OPD 2. Membuat inovasi dan koordinasi untuk mendukung penyelenggara aan administrasi pemerintaha n yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



												memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel 4. Menyusun kebijakan internal yang berkaitan dengan peraturan dan tata kelola Sistem
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												Pemerintah n Berbasis Elektronik (SPBE).
	<b>Keterbuk aan Informasi Publik</b>			Informa tif	Informa tif	Informa tif	Informa tif	Informa tif	Informa tif	Informa tif	Informa tif	1.Meningkatk an inovasi dalam menyelenga raka n pelayanan informasi untuk mendukukun g pelayanan publik yang efektif dan efisien;

												2. Meningkatka n koordinasi dan pendampinga n PPID Pembantu dalam memenuhi kewajiban Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	<b>Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik</b>			Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mendorong koordinasi dan inovasi guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah yang baik dan bersih dalam makna cepat, murah, ringan, mudah
--	---	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

1) Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintah Daerah tetap menemui berbagai macam persoalan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi dan peningkatan pelayanan Diskominfo kepada OPD
2. Belum optimal pelaksanaan dan pengembangan E- Government dalam rangka menunjang pelayanan publik dan pencapaian Indeks SPBE sesuai standard nasional
3. Belum optimal pelaksanaan persandian dan penyediaan data statistik untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah
4. Masih kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Masih kurangnya Tenaga IT

2) Permasalahan tersebut di atas, tentunya akan berdampak pada upaya pencapaian Indikator Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Adapun isu yang dapat muncul berdasarkan isu yang dianggap krusial tersebut sebagai berikut :

- ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika
- ✓ Rendahnya Kuantitas dan Kualitas

3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ;

- **Tantangan:**

- Lemahnya koordinasi antar Dinas/Instansi/Lembaga terkait;

- SDM Kominfo yang kurang;
- Belum diterapkan peraturan secara tegas.
- Masih rendahnya komitmen pemda atas pembangunan Komunikasi dan Informasi di daerah
- Keterbatasan Pagu Anggaran yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika

- **Peluang:**

- Adanya perundang-undangan/Perda yang mendukung;
- Adanya pembangunan infrastruktur yang berskala besar dan pengembangan E-government, Komunikasi , Informasi, dan Santik.

4) Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi- inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan public secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu ;

- a) Perkembangan teknologi informasi yang mengharuskan pelayanan public secara online mengakibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika selalu meningkatkan kualitas pelayanan di bidang teknologi informasi.
- b) Kemudahan masyarakat membuka akses informasi melalui medsos menuntut Dinas Komunikasi dan Informasi yang benar dan dibutuhkan masyarakat.
- c). Kebutuhan data dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan memerlukan terbangunnya system/ aplikasi data yang terintegrasi.

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu- isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Lombok Tengah. Isu- isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024, sebagai berikut :

- 1) Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui implementasi SPBE.
- 2) Membangun Satu Data Informasi Daerah
- 3) Meningkatkan Keamanan Informasi dan aplikasi
- 4) Meningkatkan pelayanan pengelolaan pengaduan dan informasi

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Keselarasan program dan kegiatan hal ini nampak baik dalam jumlah maupun indikator yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan Rencana Kerja SKPD Rencana Kerja Dinas Kominfo dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Dinas Komunikasi. Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Informatika Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025

Tabel 2.4

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah

	N O	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
1		<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>76.927.220</b>				<b>76.927.220</b>	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	11.239.395		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	11.239.395	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan	1 Dokumen	1.350.000		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan	1 Dokumen	1.350.000	



				Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD -SKPD				Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD -SKPD			
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.710.000		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.710.000	
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.200.000		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.200.000	
	5	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Dokumen Perubahan	1 Dokumen	1.050.000		Jumlah Dokumen Perubahan	1 Dokumen	1.050.000	

		Perubahan DPA SKPD		DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	12 Laporan	7.800.000		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	12 Laporan	7.800.000	
	7	Evaluasi Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	25.035.760		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	25.035.760	

	8	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah		2 Berita Acara	1 Dokumen	25.541.965		2 Berita Acara	1 Dokumen	25.541.965	
2		Administrasi Keuanagan Perangkat Daerah				<b>2.924.868.949</b>				<b>2.924.868.949</b>	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2.919.378.949		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2.919.378.949	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	1.590.000		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	1.590.000	

	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.900.000		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.900.000	
	3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>509.822.578</b>				<b>509.822.578</b>	
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan		Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	158.186.678		Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	158.186.678	
	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terpenuhinya Dokumen Perjalanan Dinas	12 Laporan	351.635.900		Terpenuhinya Dokumen Perjalanan Dinas	12 Laporan	351.635.900	

4		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>342.423.180</b>			<b>342.423.180</b>	
	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebutuhan Kantor	12 Bulan		342.423.180	Terpenuhinya Jasa Kebutuhan Kantor	12 Bulan	342.423.180	
	1	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>78.204.120</b>			<b>78.204.120</b>	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit Motor dan 2 Unit Mobil		78.204.120	Terpenuhinya BBM dan STNK SKPD	6 Unit Motor dan 2 Unit Mobil	78.204.120	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>404.848.693</b>			<b>404.848.693</b>	

1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Sarana Penunjang Dinas	1 Unit Mobil 2 Unit Motor	326.112.000	Terpenuhinya Sarana Penunjang Dinas	1 Unit Mobil 2 Unit Motor	326.112.000
	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Kantor	1 Meja Kerja, 5 Buah Meja Kerja, 5 Kursi	78.736.693	Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Kantor	1 Meja Kerja, 5 Buah Meja Kerja, 5 Kursi	78.736.693
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama</b>			<b>Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama</b>		
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah PPID (OPD, desa, sekolah, puskesmas ) yang aktif melaksanakan diseminasi informasi</b>		<b>1.325.000.000</b>	<b>Jumlah PPID (OPD, desa, sekolah, puskesmas ) yang aktif melaksanakan diseminasi informasi</b>		<b>1.325.000.000</b>

1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Layanan Media	41 Layanan	418.553.721		Jumlah Layanan Media	100%	418.553.721	
2	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		- Operator PPID Aparat Desa Terlatih -Operator OPD SP4N -LAPOR terlatih -Operator Perangkat Daerah SP4N-LAPOR	40 Orang  -45 Orang	99.878.279		Jumlah PPID Aparat Desa yang Terlatih Operator OPD SP4N -LAPOR terlatih	113 Desa  45 Orang	99.878.279	
3	Diseminasi Informasi		-Media Luar Ruangan  -Media Dalam Ruangan	-67 Media Luar Ruangan ( Baliho/ Spanduk)  -Media Dalam Ruangan ( Podcast )	806.568.000		-Media Luar Ruangan  -Media Dalam Ruangan	-67 Media Luar Ruangan ( Baliho/ Spanduk)  -Media Dalam Ruangan ( Podcast )	806.568.000	

		<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>		<b>Persentase OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online</b>				<b>Persentase OPD yang menjalankan pelayanan public secara on line</b>			
		<b>Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>1. Persentas e Domain dan Sub Domain yang aktif  2. Jumlah titik yang terkoneksi jaringan internet</b>		<b>2.447.911.3  80</b>		<b>1. Persentas e Domain dan Sub Domain yang aktif  2. Jumlah titik yang terkoneksi jaringan internet</b>		<b>2.447.911.3  80</b>	
	1	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Bandwith yang tersedia ( Mbps)	600 ( Mpbs )	1.926.193.5  68		Bandwith yang tersedia ( Mbps)	600 ( Mpbs )	1.926.193.5  68	
	2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah aolikasi khusus yang dibangun dan/atau	5 Aplikasi	205.090.980		Jumlah aolikasi khusus yang dibangun dan/atau	5 Aplikasi	205.090.980	



				dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah				dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah			
	3	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan manajemen SPBE	2 Dokumen	181.626.832		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan manajemen SPBE	2 Dokumen	181.626.832	
	4	Koordinasi penyusunan dan/atau Review Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 Domain Arsitektur dan Peta Rencana yang diusulkan	3 Dokumen	135.000.000		Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 Domain Arsitektur dan Peta Rencana yang diusulkan	3 Dokumen	135.000.000	
		<b>PROGRAM PENYELENGGGARA</b>		<b>Jumlah Instansi yang melaksanakan</b>		<b>158.491.560</b>		<b>Jumlah Instansi yang melaksanakan</b>		<b>158.491.560</b>	

		<b>AN STATISTIK SEKTORAL</b>		Layanan Lombok Tengah Satu Data				Layanan Lombok Tengah Satu Data			
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Buku Saku Statistik Buku Lombok Tengah satu Data Buku Kecamatan dalam Data		158.491.560		Buku Saku Statistik Buku Lombok Tengah satu Data Buku Kecamatan dalam Data		158.491.560	
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Statistik Sektoral Daerah	58 Data	158.491.560		Jumlah Dokumen Statistik Sektoral Daerah	58 Data	158.491.560	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		Persentase Informasi Daerah yang diamankan(%)		<b>176.836.870</b>		Persentase Informasi Daerah yang diamankan		<b>176.836.870</b>	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan		Jumlah Pengamanan	-100% -32 OPD	176.836.870		Jumlah Pengamanan	-100% -32 OPD	176.836.870	

		<b>Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persandian ( OPD )</b>	- 2 orang			<b>Persandian ( OPD )</b>	- 2 orang		
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengelola sandi yang terlatih ( orang )	-100% -32 OPD - 2 orang	176.836.870		Jumlah Pengelola sandi yang terlatih ( orang )	-100% -32 OPD - 2 orang	176.836.870	

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu :

1. Masih perlunya pengembangan Satu Data di Kabupaten Lombok Tengah agar diperoleh hasil data yang valid dan akurat, dapat dibagi ke pemerintah pusat dan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan.
2. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah
3. Perlunya upaya untuk mempertahankan/ meningkatkan indeks SPBE ( Tahun 2023 Indeks SPBE mencapai 3,00 dengan kategori Informatif )

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrembang kecamatan dan forum konsultasi public telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan Program/ Kegiatan/ SuB Kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Usulan Program/ Kegiatan sebagai berikut

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kabupaten Lombok Tengah

	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
1	<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Dokumen	

	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD -SKPD	1 Dokumen	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	12 Laporan	
	7	Evaluasi Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
2		<b>Administrasi Keuanagan Perangkat Daerah</b>				
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	

	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	
3		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terpenuhinya Dokumen Rapat	12 Bulan	
	3	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya Dokumen Perjalanan Dinas	6 Dokumen	
4		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya Jasa Kebutuhan Kantor	12 Bulan	
1		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				

	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya Sarana Penunjang Dinas	1 Unit Mobil	
		Pengadaan Mebel	Dinas Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Kantor	1 Set Meja Rapat dan Work Station	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama</b>		
		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah PPID (OPD, desa, sekolah, puskesmas ) yang aktif melaksanakan diseminasi informasi</b>		
	1	Layanan Hubungan Media	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Layanan Media	100%	



	2	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informasi	-Jumlah PPID Aparat Desa yang Terlatih -Operator OPD SP4N -LAPOR terlatih	113 Desa  45 Orang	
	3	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dinas Komunikasi dan Informasi	-Media Luar Ruangan  -Media Dalam Ruangan	-67 Media Luar Ruangan( Baliho/ Spanduk) -Media Dalam Ruangan ( Podcast)	
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>		<b>Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>		
		<b>Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
	1	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi	-Layanan Akses Internet untuk OPD -Meningkatnya Akses Layanan Komunikasi dan Informasi	400 ( Mbps )	
	2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informasi	-Jumlah dokumen arsitektur SPBE -Jumlah Aplikasi SPBE yang dikembangkan	-3 Dokumen -5 Aplikasi -100%	

				-Meningkatnya kematangan pada domain Layanan SPBE		
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Terselenggaranya pelaksanaan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota</b>		
		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Penyusunan Buku Saku Statistik, Buku Lombok Tengah Dalam Data, Buku Kecamatan Dalam Data ( Buku Statistik dan Spasial Kecamatan )</b>		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	58 Data	
		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah SDM Statistik yang terlatih	0	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		<b>-Persentase Informasi Daerah yang diamankan(%)</b> <b>-Jumlah pengamanan persandian (OPD )</b> <b>-jumlah Pengelola sandi yang terlatih</b>	<b>-100%</b> <b>-32 OPD</b> <b>- 2 orang</b>	
		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dinas Komunikasi dan Informasi	<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah</b>		

	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Komunikasi dan Informasi	Jumlah Pengelola sandi yang terlatih ( orang )	-100% -32 OPD - 2 orang	
--	--	--------------------------------------	--	-------------------------------	--

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh Indonesia
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan yang di tunjang oleh sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi digital.
3. Transportasi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan selama Tahun 2021-2026 adalah ***“Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sistem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan”***

dengan sasaran Terwujudnya Layanan SPBE yang Prima serta Terwujudnya Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE yang Optimal, Tentunya untuk mencapai Hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Mempunyai Strategi yang akan dilakukan, yaitu :

1. Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan informasi Publik
  - Peningkatan tata kelola SPBE
  - Peningkatan jumlah media informasi
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

- Pengadaan pelatihan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- Peningkatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City
- Peningkatan Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan

### 3.Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika

- Peningkatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda
- Peningkatan Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda
- Peningkatan produk sistem informasi

### 4.Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan informasi Publik
- Peningkatan tata kelola SPBE
- Peningkatan jumlah media informasi

### 5.Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

- Pengadaan pelatihan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- Peningkatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City
- Peningkatan Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan

### 6.Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika

- Peningkatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda
- Peningkatan Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda
- Peningkatan produk sistem informasi

### 7.Meningkatnya layanan lomboK tengah satu data

- peningkaan efektifitas pengembangan informasi pembangunan daerah

### 8.Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- Peningkatan pengumpulan, pengolahan, Analisa dan desiminasi data statistik daerah

9.Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia

- Peningkatan SDM yang mengikuti pelatihan kompetensi bidang persandian dan pengamanan informasi

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capain Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
	Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mendukung Sisitem Birokrasi yang baik dan pelayanan Publik yang memuaskan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Index SPBE</li> <li>- Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3,19</li> <li>-Informatif</li> <li>- Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3,30</li> <li>-Informatif</li> <li>- Tinggi</li> </ul>
		Sasaran : Terwujudnya Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE yang Optimal	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE		

		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	89%	95%
		Sasaran : Terwujudnya Layanan SPBE yang Prima	Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE		
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase OPD yang menjalankan pelayanan public secara on line	90%	95%
		Sasaran : Terwujudnya Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah serta Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi	100%	100%

			pembangunan daerah		
		Sasaran : Terwujudnya Layanan SPBE yang Prima	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	100%
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Persentase informasi daerah yang diamankan	100%	100%



## BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Rencana program dan kegiatan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan berdasarkan Permendagri No.90 tahun 2020 untuk periode Tahun 2023 s/d 2024 sebanyak : 1 Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 4 Program strategis, dengan 6 Kegiatan Penunjang, dan 4 Kegiatan Teknis dengan 21 sub kegiatan, sebagaimana tabel 4.1 . berikut :

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju  
Tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah**

Kode Rekening		Urusan /bidang Urusan Pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting		Prakiraan Maju Tahun 2026	Ket.
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>DAU</b>				

		<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								
		<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>32.425.000</b>	<b>DAU</b>			<b>35.667.500</b>	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Dokumen	3.000.000	DAU		1 Dokumen	3.300.000	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD -SKPD	1 Dokumen	2.400.000	DAU		1 Dokumen	2.640.000	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	6.375.000	DAU		1 Dokumen	7.012.000	

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	5.500.000	DAU		1 Dokumen	6.050.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	3.900.000	DAU		1 Dokumen	4.290.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian		12 Laporan	5.250.000	DAU		12 Laporan	5.775.000	

	7	Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	6.000.000	DAU		1 Laporan	6.600.000	
		<b>Administrasi Keuanagan Perangkat Daerah</b>				<b>3.363.063.313</b>				<b>3.699.369.644</b>	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	3.352.998.313	DAU		12 Bulan	3.688.298.144	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	5.115.000	DAU		1 Laporan	5.626.500	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	4.950.000	DAU		12 Laporan	5.445.000	

		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>421.640.798</b>	<b>DAU</b>			<b>463.810.345</b>	
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor		12 Paket	146.936.798	DAU		12 Paket	161.630.445	
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Dokumen Rapat		12 Bulan	0	DAU		12 Bulan	0	
	3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Bulan	0	DAU		12 Bulan	0	
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perjalanan Dinas		12 Laporan	274.709.000	DAU		12 Laporan	302.179.900	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>639.349.600</b>	<b>DAU</b>			<b>703.284.560</b>	
	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebutuhan Kantor		12 Bulan	639.349.600	DAU		12 Bulan	703.284.560	

		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>73.261.000</b>	<b>DAU</b>			<b>80.587.100</b>	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya BBM dan STNK SKPD		6 Unit Motor dan 2 Unit Mobil	73.261.000	DAU		6 Unit Motor dan 2 Unit Mobil	80.587.100	
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9 Unit	0	<b>DAU</b>		9 Unit		
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah</b>				<b>468.000.000</b>				<b>456.500.000</b>	
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Sarana Penunjang Dinas		2 Unit Mobil	650.000.000	DAU		0 Unit Mobil	0	

	2	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Kantor		1 Set Meja Rapat dan Work Station, 2 Lemari Arsip	125.000.000	DAU		1 Set Meja Rapat dan Work Station, 2 Lemari Arsip	137.500.000	
2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama				DAU	DAU			
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PPID (OPD, desa, sekolah, puskesmas ) yang aktif melaksanakan diseminasi informasi			2.853.569.395	DAU			3.138.926.331	
	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Layanan Media		100%	1.461.600.000	DAU		100%	1.607.760.000	

	2	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-Jumlah PPID Aparat Desa yang Terlatih -Operator OPD SP4N -LAPOR terlatih		113 Desa  45 Orang	311.612.355	DAU		113 Desa  45 Orang	342.772.590	
	3	Diseminasi Informasi	-Media Luar Ruang  -Media Dalam Ruang		-67 Media Luar Ruang( Baliho/ Spanduk) -Media Dalam Ruang ( Podcast)	1.080.357.040	DAU		-67 Media Luar Ruang( Baliho/ Spanduk) -Media Dalam Ruang ( Podcast)	1.188.392.741	
<b>3</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online</b>				<b>DAU</b>				
	1	Pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan	1. Persentase Domain dan Sub Domain yang aktif			2.853.569.395	DAU			3.138.926.334	



	<b>Sub Domain dilingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota</b>	<b>2. Jumlah titik yang terkoneksi jaringan internet</b>								
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Bandwith yang tersedia ( Mbps)		400 ( Mbps )	2.198.950.000	DAU		400 ( Mbps )	2.418.845.000	
2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	-Jumlah dokumen arsitektur SPBE -Jumlah Aplikasi SPBE yang dikembangkan -Meningkatnya kematangan pada domain Layanan SPBE		5 Aplikasi	160.007.380	DAU		5 Aplikasi	176.008.118	
3	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan manajemen SPBE		2 Dokumen	384.992.620	DAU		2 Dokumen	423.491.882	
4	Koordinasi penyusunan dan/atau Review Arsitektur dan Peta	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah		3 Dokumen	115.100.000	DAU		3 Dokumen	126.610.000	

		Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Daerah yang memuat 6 Domain Arsitektur dan Peta Rencana yang diusulkan							
4		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data</b>			<b>284.121.242</b>	<b>DAU</b>			<b>312.533.366</b>
	1	<b>Penyelenggaran Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Buku Saku Statistik Buku Lombok Tengah satu Data Buku Kecamatan dalam Data</b>		58 Data	284.121.242	DAU		58 Data	312.533.366
	1	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral Daerah		58 Data	284.121.242	DAU		58 Data	312.533.366
	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu	Tersedianya pengelola Data sektoral yang terlatih		0		DAU		Jumlah Dokumen Statistik Sektoral Daerah	

	Statistik Daerah yang Terintegrasi									
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Informasi Daerah yang diamankan(%)</b>			<b>253.245.604</b>	<b>DAU</b>			<b>253.245.604</b>	
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengamanan Persandian ( OPD )</b>		-100% -32 OPD - 2 orang	<b>253.245.604</b>	<b>DAU</b>		-100% -32 OPD - 2 orang	<b>253.245.604</b>	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola sandi yang terlatih ( orang )		-100% -32 OPD - 2 orang	253.245.604	DAU		-100% -32 OPD - 2 orang	253.245.604	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Terdapat 5 Program dan 10 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dimana tersebar dimasing - masing bidang dan pada sekretariat yang dalam penyebaran penganggarannya memiliki keterkaitan antara setiap kegiatan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan, koordinasi antar semua harus dilakukan agar supaya pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lancar dan dapat sesuai dengan target yang terdapat dalam indikator kinerja. Dan Untuk Keterbatasan ketersediaan anggaran maka dilakukan melalui sinergitas yang memiliki program/kegiatan yang sama baik

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan Renja tahun 2024 ini akan menjadi acuan bagi Dinas Komuniaksi dan Informatika dalam melaksanakan tupoksinya dengan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renja Tahun 2024 di arahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Dalam melaksanakan Renja, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang dan Sekertaris serta Kepala Bidang serta Kepal Seksi/ Pejabat Fungsional Kabupaten Lombok Tengah
3. Penyusunan Renja ini berpedoman dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan RPMJD serta RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026.

c. Rencana tindak lanjut

Capaian Target kinerja Tahun 2024 akan ditindak lanjuti dengan berpedoman kepada Peraturan – peraturan Daerah tentang pengelolaan serta aturan – aturan mengikat lainnya yang dijadikan dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan harapan adanya sinergritas antara program dan kegiatan yang menjadi proritas pelaksanaan dari Kementerian Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan dalam pelaksanaan pembelanjaan anggaran harus sesuai dengan aturan pengelolaan anggaran yang berlaku.

Praya, 31 Juli 2024  
Kepala Dinas Kominfo  
Kabupaten Lombok Tengah

Drs. H. MUHAMAD  
NIP.196512311989031209